

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM SENGKETA
KLAIM ASURANSI PROPERTI YANG TIDAK DIBAYARKAN
SEPENUHNYA
(Studi Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)**

**Oleh :
Adiva Alza Bimosakti
E1A021206**

ABSTRAK

Kehidupan manusia selalu berdampingan dengan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Asuransi properti sebagai pertanggungan bertujuan untuk mengurangi jumlah kerugian terhadap suatu risiko, *evenemen* menjadi syarat untuk dapat diajukannya klaim asuransi properti. Polis Asuransi menimbulkan kewajiban bagi Penanggung untuk menerima risiko kerugian yang dialami Tertanggung, sementara Tertanggung berkewajiban untuk membayarkan sejumlah premi kepada Penanggung.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan akibat hukum dalam sengketa klaim asuransi yang tidak dibayarkan sepenuhnya pada Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Metode pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan penyajian data secara naratif serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan hukum secara kontraktual dan yuridis. Perlindungan hukum kontraktual diberikan akibat perjanjian yang mengikat asas *pacta sunt servanda* dan perlindungan hukum yuridis diberikan akibat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas menunjukkan bentuk perlindungan hukum regulatif. Klaim asuransi properti yang tidak dibayarkan sepenuhnya berakibat hukum terjadinya wanprestasi, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Asuransi; Asuransi Properti; dan Klaim Asuransi Properti.

**LEGAL PROTECTION OF THE INSURED IN DISPUTES INVOLVING
INCOMPLETE PAYMENT OF PROPERTY INSURANCE CLAIMS
(Study Of The Verdict Number 748/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)**

**Written By :
Adiva Alza Bimosakti
E1A021206**

ABSTRACT

Human life is inherently accompanied by uncertainty, which carries the potential risk of loss. Property insurance serves as a form of indemnity intended to reduce the extent of financial loss arising from specific risks. The occurrence of an evenemen is a fundamental prerequisite for filing a property insurance claim. An insurance policy establishes a legal obligation for the insurer to assume the risk of loss experienced by the insured, while the insured is obliged to pay a certain premium to the insurer.

This study aims to analyze the legal protection and legal consequences in disputes concerning partially unpaid property insurance claims, as examined in Verdict Number 748/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. The research employs a normative juridical approach with an analytical descriptive specification. Data collection was conducted through a literature study, presented narratively, and analyzed qualitatively..

The results and discussion indicate that the insured receives both contractual and juridical legal protection. Contractual legal protection arises from the binding agreement based on the principle of pacta sunt servanda, while juridical legal protection is granted through dispute resolution via litigation. The role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as a supervisory institution represents a form of regulatory legal protection. The partial non-payment of a property insurance claim constitutes a breach of contract (wanprestatie), leading the panel of judges to impose sanctions in the form of compensation for the losses incurred as a result of such breach.

Keywords : *Insurance Legal Protection; Property Insurance; and Property Insurance Claims.*